

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk daerah yang melakukan pemantauan dan perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH adalah indeks yang mencatat pertumbuhan positif/negatif serta menganalisis komoditas penyumbang andil fluktuasi pada waktu dan kondisi tertentu secara berkala. Meskipun Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk daerah Non-IHK, namun Pemerintah Daerah tetap melaksanakan kewajiban dalam pelaksanaan tugas TPID yang tertuang dalam peraturan perundangan berlaku.

Mengacu pada program dan panduan pusat tentang Pengendalian Inflasi, setiap Pemerintah Daerah wajib berfokus pada sisi penguatan data dan realibilitas program, berfokus kepada program yang sinergis dengan Visi dan 8 Misi “Asta Cita” serta bersinkronisasi dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Anambas 2025-2030 khususnya pada program Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan serta Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata.

Sasaran Fluktuasi Bapok Kabupaten Kepulauan Anamabs Tahun 2025, 2026, dan 2027 adalah $1,5 \pm 0,5\%$. Mengacu pada Tema Peta Jalan Nasional “Akselerasi Perbaikan Struktural dengan Mendorong Adopsi Digital untuk Stabilisasi Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Baru”, serta Berfokus pada 4 Kunci Stretegis (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)

Perhitungan IPH Kabupaten Kepulauan Anambas atas 17 komoditas pangan bahan pokok dan penting (Bapokting) Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan beberapa pendekatan perhitungan pertumbuhan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pertumbuhan dalam periode tertentu serta periodikal. Pendekatan perhitungan ini juga bertujuan untuk memudahkan dalam pencatatan dan pelaporan pelaksanaan tugas yang lebih optimal. Perhitungan pertumbuhan IPH yang digunakan di Anambas yaitu perhitungan secara *month to month (m-t-m)*, *year to date (y-t-d)*, dan *year on year (y-o-y)*

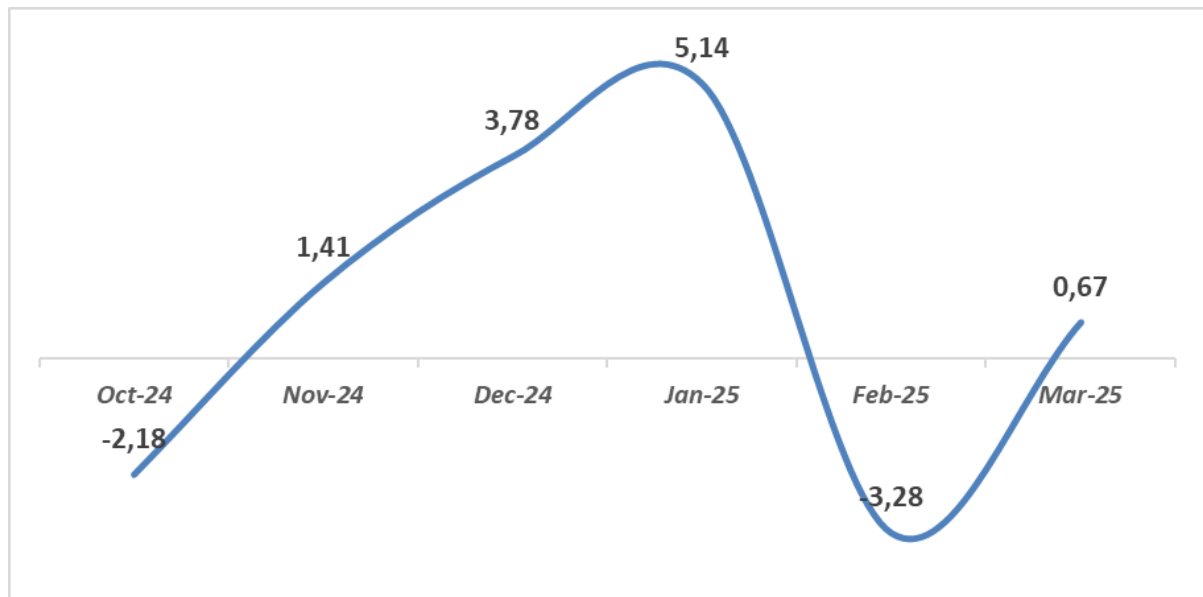
Berikut ini merupakan daftar 17 Bahan Pangan yang menjadi sasaran pantau dan fluktuatif untuk pergerakan IPH di Kepulauan Anambas, diantaranya :

(Sumber data: <http://inbok.disperindag.kepriprov.go.id/>)

Tabel 1. Daftar 17 Bahan Pangan Fluktuatif di Kabupaten Kepulauan Anambas

Beras Medium	Daging Ayam Broiler
Beras Premium	Telur Ayam Broiler
Gula Pasir	Cabe Merah Keriting
Minyak Kita	Cabe Rawit
Minyak Goreng Curah	Bawang Merah Jawa
Minyak Kemasan Sederhana	Bawang Putih
Tepung	Kedelai
Daging Sapi Murni	Jagung
Daging Sapi Impor (Beku)	

Grafik 1. Fluktuasi 17 Bahan Pangan 6 Bulan Terakhir Kurun Oktober 2024 s.d 31 Maret 2025 di Anambas (%)



Pertumbuhan IPH secara *m-t-m* tertinggi terjadi pada Bulan Januari 2025 (sebesar 5,14%), hal ini disebabkan oleh kenaikan harga *volatile foods/VF* yang ditunjukkan dengan menurunnya produksi pangan lokal serta turunnya intensitas distribusi melalui transportasi laut menjadi pemicu pertumbuhan positif kenaikan Fluktuasi Harga di Kabupaten Kepulauan Anambas. Komoditas Bahan Pangan pemicu pertumbuhan positif di Bulan Januari 2025. Pertumbuhan fluktuasi positif pada Triwulan I Tahun 2025 dipengaruhi oleh kenaikan permintaan barang *VF* menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah Tahun 2025. Fluktuasi positif pada Bulan Januari 2025 dipicu oleh kenaikan harga komoditas Cabe Merah Keriting (dari 100rb-140rb) atau naik 40%, serta kenaikan Cabe Rawit (dari 95rb-140rb) atau naik 47,37%.

Pada Bulan Februari, fluktuasi negatif (sebesar -3,28%) disebabkan oleh turunnya harga komoditas Cabe Merah Keriting (dari 140rb-110rb) atau turun 21,43%, Cabe Rawit (dari 140rb-120rb) atau turun -14,29%, dan Bawang Merah Jawa (dari 50rb-40rb) atau turun -20,00%

Pada Bulan Maret, IPH kembali tumbuh positif sebesar (0,67%), dipengaruhi oleh kenaikan harga Gula Pasir (dari 18rb-19rb) atau naik sebesar 5,56%, Minyak Kemasan Sederhana (dari 18rb-20rb) atau naik 11,11%, Daging Sapi Impor (dari 135rb-115rb) atau turun -14,81%, Cabe Merah Keriting (dari 110rb-90rb) atau turun sebesar -18,18%, Cabe Rawit (dari 120rb-130rb) atau naik sebesar 8,33%, Bawang Merah Jawa (dari 40rb-50rb) atau naik sebesar 25,00%, serta Kedelai (dari 18rb-17rb) atau turun sebesar -5,56%.

Pertumbuhan IPH secara *year to date (y-t-d)* kurun Januari s.d Maret 31 Maret 2025 sebesar (sebesar -2,74%), sedangkan pertumbuhan IPH secara *year-on year (y-o-y)* antara IPH 31 Maret 2024 dengan IPH 31 Maret 2025 adalah (sebesar 2,62%). Rata-rata IPH Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar (0,85%).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

1. Letak Geografis

Kepulauan Anambas merupakan daerah kepulauan dengan cakupan $\pm 98\%$ terdiri dari perairan dan hanya $\pm 2\%$ daratan, terdiri dari 255 pulau yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan data moda transportasi laut yang berlayar di perairan Anambas dari Instansi Syahbandar Tarempa tahun lalu, Kepulauan Anambas masih melakukan distribusi logistik dari daerah/kota luar ($\pm 90\%$ dari kabupaten/kota terdekat). Anambas bukan merupakan daerah surplus bahan pokok dan barang penting, khususnya pada komoditas kebutuhan-kebutuhan pokok (sembako). Pada sektor ketahanan pangan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan masih menemukan kendala aktual di lapangan, minat masyarakat Anambas akan bertani dan bercocok tanam dinilai sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari perspektif sosial budaya yang ditunjukkan dengan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Anambas bermukim dan tinggal di daerah pesisir dan sebagian besar masyarakat Anambas bermata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi cuaca ekstrim juga memberikan dampak negatif terhadap hasil produksi pertanian lokal.

2. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang distribusi masih tergolong belum memadai, hal ini disebabkan karena sistem bongkar muat barang (*dwellling time*) terbesar di Pusat Kota Tarempa masih belum terurai dengan baik. Pada Kondisi-kondisi tertentu seperti cuaca buruk, masalah teknis dan keterlambatan kapal dapat berpotensi memberikan efek domino pada aktifitas bongkar muat di pelabuhan. Waktu tunggu aktifitas bongkar muat rata-rata memakan waktu mencapai 14 hari kalender. Penyebab utama lamanya waktu bongkar muat ini disebabkan karena:

- Keterbatasan Tenaga kerja Bongkar Muat;
- Di Lokasi Pelabuhan Tarempa masih belum memiliki sarana pergudangan;
- Jalur Distribusi dalam kota yang sangat sempit dan memakan waktu lama untuk bongkar muat dengan volume sekitar 1m^3 (menggunakan moda transportasi kendaraan Roda 3);
- Belum dimanfaatkannya Gudang logistik sebagai sarana untuk memperlancar distribusi; dan
- Belum selesainya Pembangunan Pelabuhan Gudang Logistik Teluk Ret.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kegiatan

Keterangan

Gerakan Pangan Murah
kesatu Tahun 2025

Dilaksanakan di Halaman kantor Dinas Perikanan
Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas
pada 17 Maret 2025.

Pejabat Tinggi yang
menghadiri

Wakil Bupati Kepulauan Anambas

Sumber dana

Dana Dekonsentrasi dengan Dana Dekonsentrasi
sebanyak 1 (satu) titik.

Dokumentasi

PDF (Terlampir)

TABEL RINCIAN PENJUALAN

NO	KOMODITAS	STOK	TERJUAL	HARGA	JUMLAH
1.	Beras SPHP	500 kg	500	11.800	5.900.000
2.	Gula Pasir	300 kg	300	16.000	4.800.000
3.	Minyak Goreng	120 pcs	120	40.000	4.800.000
4.	Tepung Tulip	100 pcs	100	10.000	1.000.000
5.	Telur Ayam	100 papan	100	59.000	5.900.000
6.	Cabe Rawit	5 kg	5	80.000	400.000
7.	Bawang Merah	20 kg	20	25.000	500.000
8.	Bawang Putih	20 kg	20	37.000	740.000
9.	Sawi	7 kg	7	5.000	35.000
10.	Selada	7 kg	7	5.000	35.000
11.	Bayam	9 kg	9	5.000	45.000
12.	Kangkung	9 kg	9	5.000	45.000
13.	Mentimun	5 kg	5	5.000	25.000
GRAND TOTAL					24.225.000

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kab. Kep. Anambas

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ke-1 Tahun 2025 pada 17 Maret 2025 mendapatkan respon positif dari masyarakat dalam mengakses pangan murah.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Kep. Anambas

1. Pendataan Stok dan Harga dilakukan di beberapa Pedagang besar di Kec. Siantan, hambatan geografis di Kab. Kep. Anambas sedikit menghambat proses pengumpulan data-data secara tepat waktu.
2. Masih rendahnya produksi pertanian lokal terhadap semua komoditas barang pokok, sehingga perlu adanya program ekstensifikasi pangan yang lebih ramah biaya produksi.
3. Fluktuasi harga masih terjadi pada beberapa komoditas yang rentan terdampak fluktuasi harga seperti Komoditas Cabe (varian Cabe) dan Barang Pokok lainnya.
4. Bapokting dari Luar Daerah (Jakarta, Tanjungpinang, dan sekitarnya) memiliki dampak simultan terhadap disparitas harga barang beredar di Anambas yang cenderung lebih tinggi dari harga di daerah lainnya. Optimalisasi Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok di Pasar agar Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah preventif sehingga kenaikan Harga dan Kelangkaan Barang di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat ditekan pada titik stabil (**Terjaganya Fluktuasi Kab. Kep. Anambas 1,5+-0,5%). Target Inflasi Nasional 2025, 2026, 2027 2,5% ±1.**

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 513 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 512 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah

Tahun 2025, 2026, 2027 yang disusun dalam 4 kunci strategis (*4 Key Strategies*) yaitu :

1. Keterjangkauan Harga dan Ketersediaan Stok

TPID tetap berupaya melakukan analisa terhadap adanya potensi tekanan harga dan stok barang melalui aktivitas pemantauan harga dan stok barang beredar serta memastikan ketersediaan barang dan tidak terjadinya kelangkaan komoditas di Kepulauan Anambas.

2. Ketersediaan Pasokan/Produk

TPID secara konsisten tetap mendorong dan mengawal program-program non-moneter seperti menaikkan hasil produksi komoditas pangan lokal di daerah agar dapat mencukupi kuota kebutuhan lokal dan melakukan pengawasan harga dan distribusi barang beredar secara berkelanjutan.

3. Kelancaran Distribusi

TPID secara berkesinambungan tetap mengawal program **“Peningkatan Sistem Logistik secara Terintegrasi pengalihan lokus Pelabuhan ke Area Logistik Teluk Ret”**.

Pengalihan dilakukan secara parsial dengan penggunaan logistik dan pemanfaatan sisi Pelabuhan Teluk Ret untuk transportasi antar pulau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat memaksimalkan perannya dalam memberikan pembinaan yang lebih intensif dengan penyertaan modal dana desa, pendampingan pelatihan pengelolaan keuangan yang berbasis aplikasi serta mendorong perencanaan bantuan stimulus fiskal untuk BUMDES yang dinilai berhasil dan layak dalam operasional BUMDES.

4. Komunikasi Efektif

TPID melaksanakan fungsi koordinatif melalui Bagian Perekonomian SDA dan Inpektorat Daerah untuk mendapatkan seluruh data dukung dan informasi kegiatan/program yang berkaitan dengan TPID. Seluruh data dan informasi agar dapat dituangkan dalam suatu Laporan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan arahan Kemendagri tentang Tim Penanganan Inflasi Daerah.